LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER II TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI SEMARANG

(099090)

Unaudited

Jalan Pahlawan No. 19

Semarang, Jawa Tengah 50243

Telepon (024) 8448754; Faksimile (024) 8311459

Pos-el: info@pt-semarang.go.id

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI SEMARANG

(005.03.0300.099090.KD)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Tinggi Semarang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Semarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Semarang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, 24 Februari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

MUHAMAD ASHAR
NIP 196801141995031002

Daftar Isi

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel v
Daftar Grafik vi
Pernyataan Tanggung Jawab vii
Ringkasan 1
I. Laporan Realisasi Anggaran 3
II. Neraca 4
III. Laporan Operasional 5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6
V. Catatan atas Laporan Keuangan 7
A. Penjelasan Umum 7
A.1. Dasar Hukum 7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis 11
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 12
A.4. Basis Akuntansi 13
A.5. Dasar Pengukuran 13
A.6. Kebijakan Akuntansi 14
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 25
B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak 25
B.2 Belanja Barang 27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 28
C.1 Persediaan 28
C.2 Ekuitas 28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 29
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 29
D.2 Beban Persediaan 29
D.3 Beban Barang dan Jasa 29
D.4 Beban Perjalanan Dinas 30

D.5 Kegiatan Non-operasional 30
D.6 Pos Luar Biasa 31
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 32
E.1 Ekuitas Awal 32
E.2 Surplus/Defisit LO 32
E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar 32
E.4 Transaksi Antar Entitas 33
E.5 Ekuitas Akhir 33
F. Pengungkapan Penting Lainnya 34
F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 34
F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 34
F.3 Pengungkapan Lain-Lain 34
Lampiran dan Daftar 42

Daftar Tabel

Tabel 1. Penggolongan Kualitas Piutang.....17
Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....21
Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....23
Tabel 4. Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode s.d. 31 Desember 2025 25
Tabel 5. Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II Tahun 2023 dan Semester II Tahun 2023.....25
Tabel 6. Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2025 26
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Belanja Semester II Tahun 2023 dan Semester II Tahun 2023.....26
Tabel 8. Perbandingan Belanja Barang Semester II Tahun 2023 dan Semester II Tahun 2023.....27
Tabel 9. Perincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 10. Perincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024....28
Tabel 11. Perincian Pendapatan PNBP pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....29
Tabel 12. Perincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....29
Tabel 13. Perincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....30
Tabel 14. Perincian Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....30
Tabel 15. Perincian Kegiatan Non-operasional pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....31
Tabel 16. Perincian Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....31
Tabel 17. Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 33

Daftar Grafik

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2025 ...26

Pengadilan Tinggi Semarang
Jalan Pahlawan No. 19, Semarang, Jawa Tengah 50243
Telepon (024) 8448754; Faksimile (024) 8311459
Pos-el: info@pt-semarang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Semarang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Semarang ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 24 Februari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

MUHAMAD ASHAR
NIP 196801141995031002

Ringkasan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Semarang ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.560.000,00 atau mencapai 105,03% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp12.190.000,00.

Realisasi Belanja Negara (neto) sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp473.124.232,00 atau mencapai 98,13% dari alokasi anggaran sebesar Rp482.135.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp175.438.150,00 yang berasal dari Aset Lancar berupa Persediaan sebesar Rp175.438.150,00.

Nilai Kewajiban dan ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp175.438.150,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp13.560.000,00, sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Operasional sebesar Rp504.074.515,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp490.514.515,00. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-operasional dan Pos-Pos Luar Biasa adalah masing-masing

sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga Entitas mengalami Defisit LO sebesar Rp490.514.515,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp215.367.207,00 dikurangi Defisit LO sebesar Rp490.514.515,00 ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp450.585.458,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp175.438.150,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berbasis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode Semester II Tahun 2025 disusun dan disajikan berbasis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

Pengadilan Tinggi Semarang

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025			2024
		ANGGARAN	REALISASI	% TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	12.910.000,00	13.560.000,00	105,03	12.270.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		**12.910.000,00**	**13.560.000,00**	**105,03**	**12.270.000,00**
BELANJA					
Belanja Barang	B.2	482.135.000,00	473.124.232,00	98,13	456.403.934,00
JUMLAH BELANJA		**482.135.000,00**	**473.124.232,00**	**98,13**	**456.403.934,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. Neraca

Pengadilan Tinggi Semarang

NERACA

Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	175.438.150,00	215.367.207,00
Jumlah Aset Lancar		175.438.150,00	215.367.207,00
Jumlah Aset		**175.438.150,00**	**215.367.207,00**
EKUITAS			
Ekuitas	C.2	175.438.150,00	215.367.207,00
Jumlah Ekuitas		175.438.150,00	215.367.207,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**175.438.150,00**	**215.367.207,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. Laporan Operasional

Pengadilan Tinggi Semarang

LAPORAN OPERASIONAL

Per 31 Desember 2025

(*dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	13.560.000,00	12.270.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		**13.560.000,00**	**12.270.000,00**
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	136.649.283,00	66.980.291,00
Beban Barang dan Jasa	D.3	160.698.259,00	156.395.684,00
Beban Pemeliharaan	D.4	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	D.5	206.726.973,00	217.170.250,00
JUMLAH BEBAN		**504.074.515,00**	**440.546.225,00**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(490.514.515,00)**	**(428.276.225,00)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.5		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(490.514.515,00)**	**(428.276.225,00)**
POS LUAR BIASA	D.6		
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		**(490.514.515,00)**	**(428.276.225,00)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Pengadilan Tinggi Semarang

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
EKUITAS AWAL	E.1	215.367.207,00	179.519.664,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(490.514.515,00)	(428.276.225,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	E.3		
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Nonrevaluasi	E.3.4	0,00	0,00
Koreksi Lain-Lain	E.3.5	0,00	0,00
JUMLAH		**0,00**	**0,00**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	450.585.458,00	464.123.768,00
EKUITAS AKHIR	E.5	**175.438.150,00**	**215.367.207,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 286/KM.6/2020 tentang Perubahan Kesepuluh atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor

29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
26. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat.
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 /PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain.
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 /PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
34. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
38. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah.
39. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
40. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
41. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi

Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

42. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis

Tahun 2025 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2025–2029 yang pelaksanaan dan perencanaannya sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Semarang tahun 2025 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Semarang.

Visi Mahkamah Agung adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya menjadi lembaga yang dihormati, yang di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Selanjutnya, visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai visi dan misinya.

Visi Pengadilan Tinggi Semarang adalah "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Semarang yang Agung".

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Semarang yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Semarang telah menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Semarang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Semarang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Semarang.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga

pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satker yang dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi submodul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Piutang, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Semarang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas; serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Semarang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan LRA

- Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asa bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan LO

- Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asa bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih

dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos

Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah,
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP),
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semestertanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari

Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,

dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai Kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak: Rp13.560.000,00

Realisasi Pendapatan periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp13.560.000,00 atau mencapai 105.03% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp12.910.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Tinggi Semarang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4. Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode s.d. 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Estimasi	Realisasi	%
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	12.910.000,00	13.560.000,00	105,03
Jumlah		**12.910.000,00**	**13.560.000,00**	105,03

Realisasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya periode sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 10,51 persen dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan terdapat kenaikan PNBP dari pencatatan pembuatan akta dan berita acara penyumpahan di luar putusan pengadilan berupa penyumpahan advokat dan redaksi putusan perkara.

Perbandingan realisasi PNBP Semester II Tahun 2025 dan Semester II Tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi Pendapatan		Kenaikan (Penurunan)	
		2025	2024	Rp	%
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	13.560.000,00	12.270.000,00	1.290.000,00	10,51
Jumlah Pendapatan Bruto		**13.560.000,00**	**12.270.000,00**	**1.290.000,00**	**10,51**
Pengembalian Pendapatan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Neto		**13.560.000,00**	**12.270.000,00**	**1.290.000,00**	**10,51**

Belanja

Realisasi Belanja: Rp473.124.232,00

Realisasi Belanja periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp473.124.232,00 atau 98,13% dari anggaran Belanja sebesar Rp482.135.000,00. Perincian anggaran dan realisasi Belanja Semester II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
52	Belanja Barang	482.135.000,00	474.899.232,00	98,50
Jumlah Belanja Bruto		**482.135.000,00**	**474.899.232,00**	**98,50**
Pengembalian Belanja		0,00	1.775.000,00	0,00
Jumlah Belanja Neto		**482.135.000,00**	**473.124.232,00**	**98,13**

Realisasi Belanja periode sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 4,05% dibandingkan realisasi periode sampai dengan 31 Desember 2024. Hal ini terutama disebabkan adanya penurunan penyerapan anggaran dari Belanja Barang Persediaan dan Belanja Barang Non Operasional.

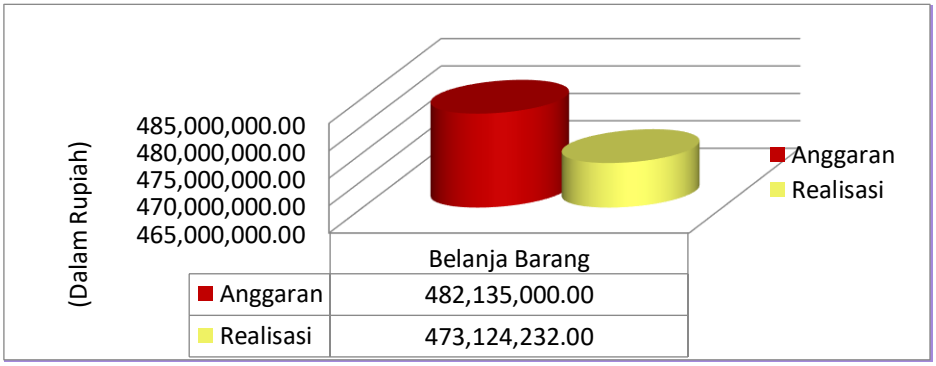
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Belanja Semester II Tahun 2025 dan Semester II Tahun 2024

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan (Penurunan)	
		2025	2024	Rp	%
52	Belanja Barang	474.899.232,00	456.403.934,00	18.495.298,00	4,05
Jumlah Belanja Bruto		**474.899.232,00**	**456.403.934,00**	**18.495.298,00**	**4,05**
Pengembalian Belanja		1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	0,00
Jumlah Belanja Neto		**473.124.232,00**	**456.403.934,00**	**16.720.298,00**	**3,66**

Komposisi anggaran dan realisasi Belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2025



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tingkat UAKPA SMT II 2023

B.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang: Rp473.124.232,00

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Realisasi Belanja Barang periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp473.124.232,00 dan Rp456.403.934,00. Realisasi Belanja Barang periode sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 8,02% dari realisasi periode sampai dengan 31 Desember 2024. Hal ini terutama disebabkan adanya penurunan penyerapan anggaran dari Belanja Barang Persediaan dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri.

Tabel 8. Perbandingan Belanja Barang Semester II Tahun 2025 dan Semester II Tahun 2024

Kode	Uraian	Realisasi Belanja Barang		Kenaikan (Penurunan)	
		2025	2024	Rp	%
5211	Belanja Barang Operasional	97.110.759,00	128.245.684,00	(31.134.925,00)	(24,28)
5212	Belanja Barang Non Operasional	63.587.500,00	28.150.000,00	35.437.500,00	125,89
5218	Belanja Barang Persediaan	105.699.000,00	82.838.000,00	22.861.000,00	27,60
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	208.501.973,00	217.170.250,00	(8.668.277,00)	(3,99)
Jumlah Belanja Barang Bruto		**474.899.232,00**	**456.403.934,00**	**18.495.298,00**	**4,05**
Pengembalian Belanja Barang		1.775.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Neto		**473.124.232,00**	**456.403.934,00**	**16.720.298,00**	**3,66**

(dalam Rupiah)

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

C.1 Persediaan

Persediaan: Rp175.438.150,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp175.438.150,00 dan Rp215.367.207,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 9. Perincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	Mutasi	31-Des-24
1	Barang Konsumsi	175.438.150,00	39.929.057,00	215.367.207,00
Jumlah		**175.438.150,00**	**39.929.057,00**	**215.367.207,00**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2 Ekuitas

Ekuitas: Rp175.438.150,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Perincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp175.438.150,00 dan Rp215.367.207,00.

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP: Rp13.560.000,00

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.560.000,00 dan Rp12.270.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 10. Perincian Pendapatan PNBP pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya				
1	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	13.560.000,00	12.270.000,00	10,51
Jumlah		**13.560.000,00**	**12.270.000,00**	10,51

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya pada Pengadilan Tinggi Semarang berasal dari hak kepaniteraan lainnya yang terdiri dari hak redaksi putusan perkara dan pencatatan pembuatan akta dan berita acara penyumpahan di luar putusan pengadilan (pelantikan advokat).

D.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan: Rp136.649.283,00

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp136.649.283,00 dan Rp66.980.291,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 11. Perincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	136.649.283,00	66.980.291,00	104,01
Jumlah		**136.649.283,00**	**66.980.291,00**	**104,01**

D.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa: Rp160.698.259,00

Beban Barang dan Jasa adalah beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul

karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp160.698.259 dan Rp156.395.684,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 12. Perincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	97.110.759,00	128.245.684,00	(24,28)
2	Beban Bahan	63.587.500,00	28.150.000,00	125,89
Jumlah		**160.698.259,00**	**156.395.684,00**	**2,75**

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas: Rp206.726.973,00

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp206.726.973,00 dan Rp217.170.250,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 13. Perincian Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	119.726.973,00	211.060.250,00	(43,27)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	6.110.000,00	(100,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	87.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**206.726.973,00**	**217.170.250,00**	**(4,81)**

D.5 Kegiatan Non-operasional

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non-operasional: Rp0,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-operasional pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar surplus Rp0,00 dan Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 14. Perincian Kegiatan Non-operasional pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
1	Pendapatan dari Kegiatan Non-operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	Beban dari Kegiatan Non-operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non-operasional		**0,00**	**0,00**	**0,00**

D.6 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa: Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Perincian Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Perincian Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal: Rp215.367.207,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp215.367.207,00 dan Rp179.519.664,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Defisit LO: Rp490.514.515,00

Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa. Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp490.514.515,00 dan Rp428.276.225,00.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset: Rp0,00

Penyesuaian Nilai Aset adalah hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan: Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan adalah koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap: Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap adalah selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Nonrevaluasi

Koreksi Aset Tetap Non-revaluasi: Rp0,00

Koreksi Aset Tetap Nonrevaluasi adalah koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Aset Tetap Nonrevaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain: Rp0,00

Koreksi Lain-Lain adalah koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas: Rp450.585.458,00

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar-K/L, antar-BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp450.585.458,00 dan Rp464.123.768.,00.

Tabel 16. Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No.	Transaksi Antar Entitas	Nilai
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	456.403.934,00
2	Diterima dari Entitas Lain	(12.270.000,00)
3	Transfer Keluar	(159.018.374,00)
4	Transfer Masuk	179.008.207,00
Jumlah		**464.123.767,00**

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir: Rp175.438.150,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp175.438.150,00 dan Rp215.367.207,00.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca per 31 Desember 2025 pada Pengadilan Tinggi Semarang yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025.

F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Selama tahun 2025, Pengadilan Tinggi Semarang tidak pernah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, tidak ada temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Semarang sehingga tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

F.3 Pengungkapan Lain-Lain

- Dalam penyusunan laporan keuangan ini, data dukung laporan utama seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data terakhir yang diambil melalui aplikasi MonSakti per tanggal 24 Februari 2026 dengan periode 31 Desember 2025 (Semester II TA 2025). Data dukung laporan tambahan seperti laporan Realisasi Anggaran Belanja per Akun maupun Organisasi, LRA Pendapatan per Akun maupun Organisasi mengambil data per tanggal 24 Februari 2026 dengan periode 31 Desember 2025 (Semester II TA 2025). Sedangkan data pembanding tahun 2024 seperti Laporan Utama dan Laporan Tambahan diambil pada tanggal 24 Februari 2026.
- Semua data pelaporan mengambil dokumen berdasarkan periode 13 (Unaudited 2025) yang seluruh satuan kerja telah melakukan tutup buku permanen periode 13 (Unaudited 2025), sehingga data pelaporan sudah berstatus final.
- Pada semester I 2025 telah dilakukan jurnal balik atas eliminasi akun kas lainnya di bendahara penerimaan yang merupakan saldo rekening koran RPL (Perkara) per 31

Desember 2024 yang bertujuan untuk memunculkan kembali nilai rupiah rekening RPL (akun kas lainnya di bendahara penerimaan).

- Pada semester II 2025 telah dilakukan jurnal eliminasi atas akun kas lainnya di bendahara penerimaan yang merupakan saldo rekening koran RPL (Perkara) per 31 Desember 2025.

F.3.1 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Semarang adalah:

1. Bank BRI Cabang Semarang Pandanaran dengan nomor rekening 654440990901000 a.n. BPG 134 PT SEMARANG yang digunakan sebagai penampung DIPA Badilum dengan saldo akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00;
2. Bank BRI Cabang Semarang Pandanaran dengan nomor rekening 032501000296306 a.n. RPL 134 PT SEMARANG UTK PDT yang digunakan sebagai penampung dana titipan pihak ketiga dengan saldo akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.700.000,00.

F.3.2 Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Tinggi Semarang Tahun Anggaran 2025 bernomor DIPA-005.03.2.099090/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan pagu awal sebesar Rp694.605.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

Kode Program, Kegiatan, dan Output	Kode Akun	Pagu Awal (Rp)
BF.1049.AEA	524111	248.000.000
BF.1049.AEA	521211	25.000.000
BF.1049.AEF	521211	10.800.000
BF.1049.AEF	524111	7.290.000
BF.1049.AEF	524119	169.650.000
BF.1049.BCA	521114	158.553.000,00
BF.1049.BCA	521811	58.178.000,00
BF.1049.BCA	521211	17.134.000,00
Jumlah		**694.605.000,00**

b. Revisi DIPA Ke-1 (22 Februari 2025)

Kode Program, Kegiatan, dan Output	Kode Akun	Semula	Menjadi
BF.1049.AEA	524111	248.000.000	248.000.000
BF.1049.AEA	521211	25.000.000	25.000.000
BF.1049.AEF	521211	10.800.000	10.800.000
BF.1049.AEF	524111	7.290.000	7.290.000
BF.1049.AEF	524119	169.650.000	169.650.000
BF.1049.BCA	521114	158.553.000,00	158.553.000,00
BF.1049.BCA	521811	58.178.000,00	58.178.000,00
BF.1049.BCA	521211	17.134.000,00	17.134.000,00
Jumlah		**694.605.000,00**	**694.605.000,00**

c. Revisi DIPA Ke-2 (21 Maret 2025)

Tidak terdapat perubahan nilai nominal, hanya terdapat buka blokir efisiensi anggaran.

Kode Program, Kegiatan, dan Output	Kode Akun	Semula	Menjadi
BF.1049.AEA	524111	248.000.000	248.000.000
BF.1049.AEA	521211	25.000.000	25.000.000
BF.1049.AEF	521211	10.800.000	10.800.000
BF.1049.AEF	524111	7.290.000	7.290.000
BF.1049.AEF	524119	169.650.000	169.650.000
BF.1049.BCA	521114	158.553.000,00	158.553.000,00
BF.1049.BCA	521811	58.178.000,00	58.178.000,00
BF.1049.BCA	521211	17.134.000,00	17.134.000,00
Jumlah		**694.605.000,00**	**694.605.000,00**

d. Revisi DIPA Ke-3 (22 April 2025)

Kode Program, Kegiatan, dan Output	Kode Akun	Semula	Menjadi
BF.1049.AEA	524111	248.000.000	248.000.000
BF.1049.AEA	521211	25.000.000	25.000.000
BF.1049.AEF	521211	10.800.000	10.800.000
BF.1049.AEF	524111	7.290.000	7.290.000
BF.1049.AEF	524119	169.650.000	169.650.000
BF.1049.BCA	521114	158.553.000,00	158.553.000,00
BF.1049.BCA	521811	58.178.000,00	58.178.000,00
BF.1049.BCA	521211	17.134.000,00	17.134.000,00
Jumlah		**694.605.000,00**	**694.605.000,00**

e. Revisi DIPA Ke-4 (14 Juli 2025)

Terdapat perubahan nilai nominal namun masih dalam satu akun dan satu RO, yaitu akun 521114 dan akun 521211 dalam RO 1049.BCA.U01 dan akun 524111 pada RO 1049.AEF

Kode Program, Kegiatan, dan Output	Kode Akun	Semula	Menjadi
BF.1049.AEA	524111	248.000.000	248.000.000
BF.1049.AEA	521211	25.000.000	25.000.000
BF.1049.AEF	521211	10.800.000	10.800.000
BF.1049.AEF	524111	7.290.000	3.675.000
BF.1049.AEF	524119	169.650.000	173.265.000
BF.1049.BCA	521114	158.553.000,00	153.445.000,00
BF.1049.BCA	521811	58.178.000,00	58.178.000,00
BF.1049.BCA	521211	17.134.000,00	22.242.000,00
Jumlah		**694.605.000,00**	**694.605.000,00**

f. Revisi DIPA Ke-5 (10 Oktober 2025)

Terdapat perubahan nilai nominal namun masih dalam satu akun dan satu RO, yaitu akun 521114 dan akun 521811 dalam RO 1049.BCA.

Kode Program, Kegiatan, dan Output	Kode Akun	Semula	Menjadi
BF.1049.AEA	524111	248.000.000	248.000.000
BF.1049.AEA	521211	25.000.000	25.000.000
BF.1049.AEF	521211	10.800.000	10.800.000
BF.1049.AEF	524111	3.675.000	3.675.000
BF.1049.AEF	524119	173.265.000	173.265.000
BF.1049.BCA	521114	153.445.000,00	122.639.000
BF.1049.BCA	521811	58.178.000,00	88.984.000,00
BF.1049.BCA	521211	22.242.000,00	22.242.000,00
Jumlah		**694.605.000,00**	**694.605.000,00**

g. Revisi DIPA Ke-6 (27 Oktober 2025)

Terdapat perubahan total pagu yang disebabkan buka blokir dan penarikan pagu belanja perjalanan dinas oleh eselon I

Kode Program, Kegiatan, dan Output	Kode Akun	Semula	Menjadi
BF.1049.AEA	524111	248.000.000	124.000.000
BF.1049.AEA	521211	25.000.000	25.000.000
BF.1049.AEF	521211	10.800.000	10.800.000
BF.1049.AEF	524111	3.675.000	30.000
BF.1049.AEF	524119	173.265.000	88.440.000
BF.1049.BCA	521114	122.639.000	122.639.000
BF.1049.BCA	521811	88.984.000,00	88.984.000,00
BF.1049.BCA	521211	22.242.000,00	22.242.000,00
Jumlah		**694.605.000,00**	**482.135.000,00**

h. Revisi DIPA Ke-7 (3 Desember 2025)

Terdapat perubahan nilai nominal namun masih dalam satu akun dan satu RO, yaitu akun 521114, akun 521811 dan akun 521211 dalam RO 1049.BCA.

Kode Program, Kegiatan, dan Output	Kode Akun	Semula	Menjadi
BF.1049.AEA	524111	124.000.000	124.000.000
BF.1049.AEA	521211	25.000.000	25.000.000
BF.1049.AEF	521211	10.800.000	10.800.000
BF.1049.AEF	524111	30.000	30.000
BF.1049.AEF	524119	88.440.000	88.440.000
BF.1049.BCA	521114	122.639.000	103.761.000
BF.1049.BCA	521811	88.984.000,00	102.286.000,00
BF.1049.BCA	521211	22.242.000,00	27.818.000,00
Jumlah		**482.135.000,00**	**482.135.000,00**

i. Revisi DIPA Ke-8 (11 Desember 2025)

Terdapat perubahan nilai nominal namun masih dalam satu akun dan satu RO, yaitu akun 521114 dan akun 521811 dalam RO 1049.BCA.

Kode Program, Kegiatan, dan Output	Kode Akun	Semula	Menjadi
BF.1049.AEA	524111	124.000.000	124.000.000
BF.1049.AEA	521211	25.000.000	25.000.000
BF.1049.AEF	521211	10.800.000	10.800.000
BF.1049.AEF	524111	30.000	30.000
BF.1049.AEF	524119	88.440.000	88.440.000
BF.1049.BCA	521114	103.761.000	100.298.000
BF.1049.BCA	521811	102.286.000,00	105.749.000,00
BF.1049.BCA	521211	27.818.000,00	27.818.000,00
Jumlah		**482.135.000,00**	**482.135.000,00**

F.3.3 Penjelasan Terkait Jurnal Bantu pada Menu Jurnal Penyesuaian Khusus dan Jurnal Manual SAKTI

- Pada semester I 2025 telah dilakukan jurnal balik atas eliminasi akun kas lainnya di bendahara penerimaan yang merupakan saldo rekening koran RPL (Perkara) per 31 Desember 2024 yang bertujuan untuk memunculkan kembali nilai rupiah rekening RPL (akun kas lainnya di bendahara penerimaan).

- Pada semester II 2025 telah dilakukan jurnal eliminasi atas akun kas lainnya di bendahara penerimaan yang merupakan saldo rekening koran RPL (Perkara) per 31 Desember 2025.

F.3.4 Ralat/Koreksi SPM/SP2D, SSBP, dan SSPB

Selama Semester II Tahun 2025 tidak terdapat ralat/koreksi SPM, SSBP dan SSPB.

F.3.5 Pengungkapan Keuangan Perkara

Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
Januari s.d. Desember 2025	Biaya Perkara	1.514.889,50	103.950.000,00	104110.000,00	1.354.889,50	8.700.000,00	1.204.900,00
	Biaya Eksekusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.514.889,50	103.950.000,00	104110.000,00	1.354.889,50	8.700.000,00	1.204.900,00

Terdapat selisih lebih antara saldo akhir dengan saldo bank dan saldo brankas sebesar Rp8.550.000 disebabkan biaya proses belum diregister atau belum dibukukan.

F.3.6 Pengungkapan Pelaporan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah dimutakhirkan dengan Peraturan Presiden Tahun 2025, pada Mahkamah Agung terdapat alokasi anggaran untuk prioritas nasional (PN), yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya anusia berkualitas dan berdaya saing (PN III);
2. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN VI);

3. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN VII).

Secara khusus, di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, terdapat 2 (dua) program prioritas/kegiatan prioritas, yaitu:

1. Penegakan hukum nasional/perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, yang terdiri dari 1 (satu) output prioritas, yaitu bimbingan teknis penanganan perkara berbasis keadilan restoratif
2. Penegakan hukum nasional/peningkatan akses terhadap keadilan, yang terdiri dari 3 (tiga) output prioritas, yaitu pos bantuan hukum, perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan, dan perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.

Program prioritas pada Mahkamah Agung terdiri dari pos bantuan hukum, Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan dan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara, namun pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak terdapat program prioritas nasional tersebut, hanya terdapat pada Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

F.3.7 Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63/PA/SK/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2023 dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Semarang Nomor W12.U/001/SK-KPA/PB/KU.01/I/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan

Penandatangan Surat Perintah Membayar, Staf Pengelola Keuangan, Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Semarang; Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang Nomor W12.U/002/SK-SEK/KU.01/1/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Tinggi Semarang telah menunjuk:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Muhamad Ashar
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Yani Setya Wardani
Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM	:	Abu Sahid
Bendahara Pengeluaran	:	Artyani Eko Harwati
Bendahara Penerimaan	:	Nurul Anisa

LAMPIRAN
DAN DAFTAR

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UAKPA
PERIODE SEMESTER II TA 2025

Kode dan Nama BA : (005) Mahkamah Agung RI
Kode dan Nama Es-1 : (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Kode dan Nama UAPPAW : (0300) Jawa Tengah
Kode dan Nama Satker : (099090) Pengadilan Tinggi Semarang

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. ***Jika tidak ada data, isi dengan N/A***			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, ***agar diuraikan pada lembar lampiran***			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok *(Hardcopy)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Pernyataan Tanggung Jawab	**√**		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE *face*	**√**		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	**√**		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Neraca Percobaan Akrual	**√**		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	**√**		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	**√**		Ada
4. Apakah Terdapat Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri (khusus bagi KL yang memiliki PHLN)	**NA**		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN SAKTI			
	Sama	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan SAKTI termasuk perbandingan dengan tahun 2025 ?	**√**		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca *Balance*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di SAKTI melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"?		**√**	Tidak
Saldo antar Laporan	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Apakah Nilai *"Surplus/(Defisit)-LO"* di LO = Nilai *"Surplus/ (Defisit) - LO"* di LPE?	**√**		Sama
3. Apakah Saldo *"Ekuitas Akhir"* di LPE = *"Saldo Ekuitas"* di Neraca?	**√**		Sama
Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada"? (Cek di SAKTI, menu Daftar >> Akun Non Ref)?		**√**	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Cek SAKTI, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"?		**√**	Tidak
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persdiaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti?		**√**	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? *(Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)?*		**√**	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**

1.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi **dibayar di muka *(prepaid)***		**√**	Tidak
2.	Akun 114214/5/6/8 **Uang Muka Belanja** Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		**√**	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain **Yang Masih Harus Dibayar**		**√**	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan (akun 218211)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (*Cek di Neraca Percobaan saldo awal*)?		**√**	Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2024? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2024)?	**NA**		Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 **tidak sama** saldo akun 391133 pada akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	**NA**		Tidak
Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya **≤** akun 218211 ?	**NA**		Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan?		**√**	Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI?		**√**	Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap?	**NA**		Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya?	**NA**		Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya?	**NA**		Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung **≥** akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah?	**NA**		Ya
Saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi SAKTI				

Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)		
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM SAKTI?	0
	Selisih secara absolut diperoleh dari SAKTI (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tersebut?	
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	0

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan *kecuali BA.015.04?*		**√**	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBP Baru *(Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)*		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun 423xx?		**√**	Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		**√**	Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		**√**	Tidak

4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL?		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, *misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan* ?		√	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? *seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)* ?		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah?		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? *(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?*		√	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain)?		√	Tidak
TELAAH TERKAIT BLU		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"?		√	Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI? (*cek pada aplikasi SAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal*)		√	Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU?		√	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)?		√	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)?		√	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			0
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			0
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			0
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?	**NA**		Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		√	Tidak
Jenis TransaksiK10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi SAKTI kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		√	Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	**NA**		Ya

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (*saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi*)		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
*Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang **dapat** bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).*			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang *sesuai Perdirjen 43/2015*	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang *(Jk.Pendek dan Jk.Panjang)* - Saldo Akhir Penyisihan Piutang *(Jk.Pendek dan Jk.Panjang)* = Beban Penyisihan Piutang LO	**NA**		Ya
Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.			

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Ada	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak
Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi SAKTI kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111			
Pengecekan akun koreksi	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118, dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	**NA**		Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.			

NERACA

	Ya	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah Kas di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN?	√		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban?		√	Tidak
Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi SAKTI kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)			
3. Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2024, apakah demikian?	√		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Sakti?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ada
Pengecekan persediaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)		√	Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ada
Mulai tahun 2018 dengan SAKTI G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi.			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas?		√	Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas?		√	Ya
Pengecekan Jurnal Akrual	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?		√	Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas?		√	Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar di muka pada Neraca?		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)?		√	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca?		√	Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	**Ya/Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di SAKTI?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2025 di SAKTI?		√	Tidak
Pada SAKTI G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"			
3. Apakah menurut SAKTI terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK?		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?		√	Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi SAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi SAKTI yang meliputi Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi SAKTI, kemudian pilih "daftar BMN")		√	

MENU DAFTAR BMN	Seharusnya	Ya	Tidak
1. Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		√
2. Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)		0	
3. Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)		0	
4. Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		√
5. Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)		0	
6. Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)		0	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui SAKTI menu daftar >> pagu minus")		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja *"tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?*		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo?		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS?		√	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo?		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo?		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo?		√	Tidak
SAKTI Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			

SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Di bawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. **Apakah Jurnal tahun 2025 telah diselesaikan (Dinihilkan)?**	**NA**		
2. **Apakah telah dilakukan Jurnal *Take-In Reval* dengan benar?**	**NA**		
Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru pada tahun 2025			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara *Stock Opname* Persediaan?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	**NA**		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan?		√	Tidak
4. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)?	√		Ya
5. Adakah PNBP digunakan langsung?		√	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	**NA**		Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	**NA**		Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai-nilai yang seharusnya dituliskan di CaLK.			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	**Ya/Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca?	**NA**		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format?	**NA**		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	**NA**		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana yang Dibatasi Penggunaannya"?	**NA**		Ada
Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.			
6. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan?	**NA**		Ya
7. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya
8. Apakah belanja dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	**NA**		Ya

ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional?	**NA**		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang?	**NA**		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2025 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2025?	**NA**		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir **(*rumus perhitungan beban persediaan terlampir*)**?	√		Ya

Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak
1. Apakah terdapat pengungkapan atas *Refocussing* kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19?	**NA**	
2. Jika terdapat *Refocussing* kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L?	Rp0	
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19?	**NA**	
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19?	**NA**	
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19?	**NA**	
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19?	**NA**	
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	**Ada**	**Tidak**
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19?	**NA**	
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19?	**NA**	
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19?	**NA**	

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19?	**NA**	
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19?	**NA**	
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		**Ada**	**Tidak**
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain ,0:		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19	**NA**	
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19	**NA**	
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19	**NA**	
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan …….	**NA**	
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain:		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19	**NA**	
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19	**NA**	

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi SAKTI.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

Mengetahui,
Pejabat Penyusun LKKL,

MUHAMAD ASHAR
NIP 196801141995031002

Semarang, 31 Desember 2025
Penelaah,

NURUL ANISA
NIP 199105152015032002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG 099090

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM
Tgl Cetak : 24/02/26 8:41 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**12,910,000**	**13,560,000**	**650,000**	**105.03**	**14,180,000**	**12,270,000**	**(1,910,000)**	**86.53**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	12,910,000	13,560,000	650,000	105.03	14,180,000	12,270,000	(1,910,000)	86.53
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**12,910,000**	**13,560,000**	**650,000**	**105.03**	**14,180,000**	**12,270,000**	**(1,910,000)**	**86.53**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	482,135,000	473,124,232	(9,010,768)	98.13	464,000,000	456,403,934	(7,596,066)	98.36
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	482,135,000	473,124,232	(9,010,768)	98.13	464,000,000	456,403,934	(7,596,066)	98.36
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI SEMARANG 099090

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM
Tgl Cetak : 24/02/26 8:41 AM

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**482,135,000**	**473,124,232**	**(9,010,768)**	**98.13**	**464,000,000**	**456,403,934**	**(7,596,066)**	**98.36**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

Semarang, 24 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DRS. MUHAMAD ASHAR, M.H.
NIP 196801141995031002

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(005) MAHKAMAH AGUNG**

ESELON I : **(03) Ditjen Badan Peradilan Umum**

WILAYAH/PROVINSI : **(0300) JAWA TENGAH**

SATUAN KERJA : **(099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM

Tgl Cetak : 24/02/26 8:41 AM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	13,560,000	12,270,000	1,290,000	10.513
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	13,560,000	12,270,000	1,290,000	10.513
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	13,560,000	12,270,000	1,290,000	10.513
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	136,649,283	66,980,291	69,668,992	104.014
Beban Barang dan Jasa	160,698,259	156,395,684	4,302,575	2.751
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	206,726,973	217,170,250	(10,443,277)	(4.809)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(005) MAHKAMAH AGUNG**

ESELON I : **(03) Ditjen Badan Peradilan Umum**

WILAYAH/PROVINSI : **(0300) JAWA TENGAH**

SATUAN KERJA : **(099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM

Tgl Cetak : 24/02/26 8:41 AM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	504,074,515	440,546,225	63,528,290	14.42
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(490,514,515)	(428,276,225)	(62,238,290)	14.532
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(490,514,515)	(428,276,225)	(62,238,290)	14.532
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(490,514,515)	(428,276,225)	(62,238,290)	14.532

Keterangan :

FINAL

Semarang, 24 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DRS. MUHAMAD ASHAR, M.H.

NIP 196801141995031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Tgl Data : 24/02/26 6:46 AM

Tgl Cetak : 24/02/26 8:41 AM

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	215,367,207	179,519,664	35,847,543	19.97
SURPLUS/DEFISIT-LO	(490,514,515)	(428,276,225)	(62,238,290)	14.53
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	450,585,458	464,123,768	(13,538,310)	(2.92)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(39,929,057)	35,847,543	(75,776,600)	(211.39)
EKUITAS AKHIR	175,438,150	215,367,207	(39,929,057)	(18.54)

Keterangan :

FINAL

Semarang, 24 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DRS. MUHAMAD ASHAR, M.H.

NIP 196801141995031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 03**	**Ditjen Badan Peradilan Umum**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0300**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 099090**	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/02/26 8:42 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 24/2/26 3:27 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	158,553,000	100,298,000	97,110,759	0	97,110,759	96.82	3,187,241
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	158,553,000	100,298,000	97,110,759	0	97,110,759	96.82	3,187,241
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	52,934,000	63,618,000	63,587,500	0	63,587,500	99.95	30,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	52,934,000	63,618,000	63,587,500	0	63,587,500	99.95	30,500
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	58,178,000	105,749,000	105,699,000	0	105,699,000	99.95	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	58,178,000	105,749,000	105,699,000	0	105,699,000	99.95	50,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	255,290,000	124,030,000	121,501,973	1,775,000	119,726,973	96.53	4,303,027
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	169,650,000	88,440,000	87,000,000	0	87,000,000	98.37	1,440,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	424,940,000	212,470,000	208,501,973	1,775,000	206,726,973	97.3	5,743,027
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	694,605,000	482,135,000	474,899,232	1,775,000	473,124,232	98.13	9,010,768
	JUMLAH BELANJA	694,605,000	482,135,000	474,899,232	1,775,000	473,124,232	98.13	9,010,768

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 03**	**Ditjen Badan Peradilan Umum**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0300**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 099090**	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 24/02/26 8:42 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	12,910,000	13,560,000	0	13,560,000	105.03
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	12,910,000	13,560,000	0	13,560,000	105.03
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	12,910,000	13,560,000	0	13,560,000	105.03
	JUMLAH PENDAPATAN	12,910,000	13,560,000	0	13,560,000	105.03

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM

Tgl Cetak : 24/02/26 8:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	175,438,150	215,367,207	(39,929,057)	(18.54)
JUMLAH ASET LANCAR	**175,438,150**	**215,367,207**	**(39,929,057)**	**(18.54)**
JUMLAH ASET	**175,438,150**	**215,367,207**	**(39,929,057)**	**(18.54)**

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	175,438,150	215,367,207	(39,929,057)	(18.54)
JUMLAH EKUITAS	**175,438,150**	**215,367,207**	**(39,929,057)**	**(18.54)**
JUMLAH EKUITAS	**175,438,150**	**215,367,207**	**(39,929,057)**	**(18.54)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**175,438,150**	**215,367,207**	**(39,929,057)**	**(18.54)**

Keterangan :

FINAL

Semarang, 24 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DRS. MUHAMAD ASHAR, M.H.

NIP 196801141995031002

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
UNIT ORGANISASI	**: 03**	**Ditjen Badan Peradilan Umum**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0300**	**JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA	**: 099090**	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

Tgl. Cetak 24/02/2026 8:42 AM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	215,367,207	0
0.0	391111	Ekuitas	0	215,367,207
JUMLAH			**215,367,207**	**215,367,207**

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Tgl Data : 24/02/26 2:21 AM

Tgl Cetak : 24/02/26 8:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	175,438,150	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	473,124,232
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	13,560,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	132,091,924	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	123,113,150
0.0	391111	Ekuitas	0	215,367,207
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	13,560,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	97,110,759	0
3.0	521211	Beban Bahan	63,587,500	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	119,726,973	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	87,000,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	136,649,283	0
JUMLAH			**825,164,589**	**825,164,589**

Keterangan :

FINAL

Semarang, 24 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DRS. MUHAMAD ASHAR, M.H.

NIP 196801141995031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Tgl Data : 24/02/26 6:46 AM

Tgl Cetak : 24/02/26 8:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	473,124,232
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	13,560,000	0
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	13,560,000
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	97,110,759	0
3.0	521211	Belanja Bahan	63,587,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	105,699,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	121,501,973	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	87,000,000	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,775,000
JUMLAH			**488,459,232**	**488,459,232**

Keterangan :

FINAL

Semarang, 24 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DRS. MUHAMAD ASHAR, M.H.

196801141995031002

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

Tgl Data : 24/02/26 6:46 AM
Tanggal : 24/02/26 8:43 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099090 PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	5,800,500
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	24,000
1010301003	Penjepit Kertas	2,316,000
1010301005	Buku Tulis	4,445,000
1010301006	Ordner Dan Map	9,525,000
1010301007	Penggaris	300,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	20,000
1010301010	Alat Perekat	1,112,000
1010301012	Staples	1,150,000
1010301013	Isi Staples	130,000
1010301014	Barang Cetakan	104,264,964
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	400,000
1010302001	Kertas HVS	13,150,000
1010302002	Berbagai Kertas	237,500
1010302003	Kertas Cover	325,000
1010302004	Amplop	990,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	3,550,000
1010304006	USB/Flash Disk	3,000,000
1010304010	Mouse	200,000
1010304011	CD/DVD	3,150,000
1010307006	Atribut	21,348,186
Jumlah Barang Konsumsi		**175,438,150**
TOTAL		**175,438,150**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.